

Koperasi Kopi Sebagai Agensi Pemberdaya Agribisnis bagi Pengembangan Ekonomi Lokal

Ery Supriyadi R, Tuti Karyani, Nurul R Mutiarasari

Pendahuluan

BPS (2021) melalui publikasi Statistik Kopi Indonesia (2020) menyajikan data total produksi kopi Indonesia mencapai 762.380 ton. Sebanyak 99,33 persen atau mencapai 757.300 ton terhadap total produksi kopi berasal dari perkebunan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam iklim pandemi sekalipun, produksi kopi relatif stabil yang didukung oleh pemasaran yang tetap tinggi pada masa pandemi Covid-19 tengah berlangsung. Komoditas memberi kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang positif pada sektor akomodasi dan makanan, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Kopi merupakan komoditas pertanian penghasil devisa bagi Indonesia dan menjadi sumber mata pencaharian bagi 1,8 juta kepala keluarga petani yang tersebar di berbagai provinsi dan 69 ribu keluarga karyawan perkebunan besar, berperan menyerap lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri dalam negeri, pelestarian lingkungan serta pengembangan wilayah (Ditjenbun, 2018)

Percepatan ekonomi dimulai dengan menggali potensi bagi pengembangan ekonomi bagi masa depan. Terlebih lagi pasca pandemi Covid-19. Pemulihan dan percepatan ekonomi pada masa pandemi diawali dengan upaya mengatasi serangan dan dampak virus Covid-19 dengan tindakan protokol kesehatan pada berbagai sendi kehidupan, diikuti dengan kemampuan menumbuhkembangkan kondisi sosial-budaya, sosial-lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

BPS (2021) menyajikan data ekspor kopi Indonesia mencapai 379,35 ribu pada tahun 2020, walaupun total nilai ekspor kopi cenderung mengalami penurunan, yaitu sebesar US\$ 821,93 juta. Selama dua tahun masa pandemi Covid-19, volume ekspor kopi pada tahun 2019 dan 2020, mengalami peningkatan, yaitu 359 ribu ton (2019) dan 379 ribu ton (2020). Pada tahun 2021 pasokan kopi mencapai 795 ribu ton, sementara tingkat konsumsi kopi sebesar 370 ribu ton. Produksi kopi nasional berasal dari sentra kopi Indonesia di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Realita menunjukkan bahwa secara nasional, komoditas kopi memberikan kontribusi terhadap ekspor (Bank Indonesia, 2021). Dalam kondisi pandemi Covid-19, komoditas kopi tetap memberikan kontribusi dari nilai ekspor non migas yang menduduki urutan kelima setelah karet alam, minyak kelapa sawit, kopi dan biji coklat. Dengan demikian, komoditas kopi memegang peranan yang penting dalam menunjang nilai ekspor. Nilai ekspor komoditas kopi berkontribusi terhadap total nilai ekspor nasional. Pada tingkat regional Jawa Barat, terdapat 13 daerah dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menghasilkan komoditas kopi. Namun demikian, kategori Klassen tentang perkembangan ekonomi pada sentra produksi perkebunan di Jawa Barat terdiri dari 53,8% termasuk kategori daerah yang terbelakang dan kurang berkembang, sebesar 38,5 % berkembang,

dan 7,7 % daerah maju. Hal ini terindikasi bahwa wilayah produksi kopi mengalami keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan rendahnya rata-rata pendapatan per kapita bagi para petani kopi.

Strategi pembangunan perkebunan secara partisipatif ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana proses pembangunan yang berakar dari bawah (*grass root oriented*). Strategi pembangunan ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas bagi kehidupan masyarakat, peningkatan pendapatan dan meraih peluang berusaha yang berbasis pada kemampuan lokal.

Pendekatan pengembangan komoditas strategis kopi ditujukan bagi peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat yang bersifat produktif maupun konsumtif. Keberhasilan pengembangan komoditas strategis kopi ini diharapkan terciptanya kondisi masyarakat pertanian yang menikmati hasil pembangunan secara adil, merata dan seimbang. Kenyataannya, keadaan lapangan masih dihadapkan pada masih adanya ketidakseimbangan kesempatan pasar dengan perolehan pendapatan petani kopi. Suasana pandemi Covid-19 menambah lagi tantangannya, sejak kejadian pandemi Covid-19 hingga saat ini melemahnya penjualan dan pendapatan dari komoditas kopi, walau secara budidaya, produksi, pengolahan, dan kesempatan pemasarannya relative semakin terbuka.

Muncul pertanyaan sejauhmana relevansi pengembangan komoditas strategis kopi relevan dan positif bagi kawasan perdesaan dan ekonomi lokal, dan bagaimana peran koperasi kopi sebagai salah satu agen perubahan yang sejatinya menjadi organisasi dan entitas bisnis kopi bagi para petani/pekebun kopi di Kawasan perdesaan. Apakah, fenomena penyedotan ekonomi oleh ekonomi perkotaan terhadap koperasi kopi dan petani kopi memang terus akan terjadi. Tentunya dalam konteks rantai nilai dan rantai pasok, selayaknya terjadi keseimbangan dan pemerataan perolehan kesempatan bagi petani dan koperasi dalam pendapatan dan pertumbuhan ekonominya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan usaha agribisnis kopi dan kelembagaan koperasi kopi cenderung bermotif program pemerintah dan pendekatan proyek. Program pembangunan melalui pendekatan komoditas dan berorientasi *top down* dapat menyebabkan adanya ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pemerintah. Tommy Firman (1996) menyatakan bahwa program-program pembangunan yang bersifat *top down* mengakibatkan daerah cenderung sangat tergantung pada pusat di antaranya dalam hal anggaran pembangunan, kebijakan, dan aliran barang. Pengembangan agribisnis kopi bertumpu keadaan lokalitas dan sumberdaya daerah secara mandiri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan wilayahnya berbasis spesifikasi dan potensi daerah yang dimilikinya hingga ekonomi lokal semakin berkembang yang didukung oleh koneksi yang terintegrasi dan berinteraksi dengan wilayah lainnya.

Jawa Barat memiliki potensi dan kontribusi yang besar dalam produksi dan ekspor komoditas perkebunan, namun kurang memperoleh nilai tambah bagi wilayahnya bahkan mengalami pertumbuhan wilayah yang relatif kurang berkembang pada sentra-sentra produksi. Padahal, seharusnya dengan semakin berkembangnya peluang pasar dan produksi komoditas perkebunan akan memberikan nilai tambah yang positif secara ekonomi maupun perkembangan wilayah di sentra-sentra produksi.

Selain itu, pendapatan yang bersumber dari ekspor produk komoditas perkebunan yang dihasilkan akan memberikan dampak ikutan berupa peningkatan pendapatan

Book Chapter

perusahaan lokal, peningkatan pendapatan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah, dan berkembangnya wirausaha lokal. Namun pertanyaannya adalah apakah mekanisme ini berjalan mulus, mengingat pengembangan ekonomi lokal dihadapkan kepada para perilaku aktor pembangunan di wilayah itu sendiri. Sejauhmana koperasi kopi memiliki kepedulian dan kebersamaan dalam kohesi sosial ekonomi yang kuat dengan petani kopi sebagai anggotanya, termasuk pula keberpihakan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, wirausahawan, tenaga kerja dan dunia usaha kepada pengembangan organisasi koperasi. Jika kepedulian dan kebersamaan dalam kohesi sosial ekonomi para pelaku lokal tinggi, maka kemampuan lokalitas meraih kesempatan tinggi dan menangkai terjadinya kebocoran terhadap dari wilayah lain relatif rendah, sehingga terdapat percepatan proses pengembangan ekonomi lokal.

Kopi mempunyai kontribusi yang cukup penting dalam perekonomian, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa . Pada iklim pandemi Covid-19, pasar kopi tetap stabil, sehingga serapan tenaga kerja pada kegiatan budidaya, panen, pasca panen, dan pemasaran tetap berlangsung. Pertanyaannya adalah sejauhmana koperasi kopi mampu meraih peluang pasar ini dan berapa besar pangsa pasar secara nyata bermanfaat bagi promosi ekonomi anggotanya.

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Coffey dan Polese (1984) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal merupakan peningkatan peran serta komponen *endogenous* dalam kehidupan sosial ekonomi lokalitas dengan tetap memperhatikan keterikatan dan integrasi fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas. Tumbuh dan berkembangnya perusahaan dan kewirausahaan lokal merupakan ciri dari adanya pembangunan ekonomi lokal.

Ada empat (4) tahapan proses pengembangan ekonomi lokal (Coffey dan Polese, 1984), yang meliputi tumbuhberkembangnya kewirausahaan lokal, lepas landas perusahaan lokal, berkembangnya perusahaan lokal ke luar lokalitas, serta terbentuknya suatu perekonomian yang bertumpu pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan komparatif aktivitas ekonomi lokal. Sementara Blakely (1989) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal adalah suatu proses pembangunan ekonomi di mana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang dimiliki melalui pola kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya, menciptakan lapangan kerja, memberikan stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya.

Sebagai suatu proses, peran kerjasama lembaga pemerintah daerah, swasta dan kemasyarakatan sangat menentukan dalam pengembangan ekonomi lokal. Proses pembangunan ekonomi lokal berupaya melakukan upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada yaitu sumberdaya fisik, manusia, dan kelembagaannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi lokal berintikan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan lokal yang semakin berkembang atau *endogeneous development*. Dalam istilah lainnya, pembangunan ekonomi lokal merupakan pemanfaatan faktor-faktor internal-lokal guna pengembangan ekonomi lokal (*locally based development*).

Ekonomi lokal dimaknai sebagai ekonomi yang "*local genuine*" yang mampu masuk globalisasi. Terdapat proses kerjasama *quadruple helix* (pemerintah, swasta, dunia usaha,

dan masyarakat). Ekonomi lokal membentuk kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi daerah (Supriyadi, 2007). Fokus pengembangan ekonomi lokal mencakup (1) pemasaran dan ekspor, (2) pengembangan klaster (*cluster development*), (3) kemitraan pemangku kepentingan, dan (4) pemberdayaan.

Konsep dan praktik pengembangan ekonomi lokal semakin berkembang sejalan dengan dinamika pembangunan yang senantiasa bertransformasi, mengalami perubahan, serta tindakan yang berbeda/heterogen. Berdasar teori heterodoks yang merupakan sempalan dari teori liberal dan radikal, Damanhuri (2010) menjelaskan fenomena, faktor, dan perilaku para pelaku pembangunan, terutama berkait dengan penyesuaian berperilaku dan kelembagaan pembangunan pada negara industri maju dan sedang berkembang. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya penyesuaian dengan realitas yang ada di negara berkembang, sehingga kondisi Negara Industri Maju (NIM) tidak bisa menjadi referensi bagi Negara Sedang Berkembang (NSB); mengakui kebudayaan, agama dan nilai-nilai lokal sebagai faktor pembangunan; terdapat sinkronisasi antara nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai lokal; dan peran penting dari UKM dan LSM lokal sebagai penggerak dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Teori heterodoks ini berusaha melestarikan nilai-nilai lokal yang sudah ada, namun di sisi lain tetap mampu menyerap perkembangan modern yang muncul.

Transformasi ekonomi global saat ini menuntut setiap pelaku ekonomi dapat berperilaku efisien. Sebagai pelaku ekonomi dan agen perubahan, koperasi kopi harus efisien dalam melakukan kegiatannya, terlebih lagi koperasi masuk dalam percaturan ekonomi kopi dunia. Koperasi harus mampu menjembatani kemajuan dan pertumbuhan ekonomi petani kopi dan koperasi tidak terpinggirkan.

Keterkaitan Desa Kota Dan Pemberdayaan Agribisnis Kopi

Terdapat tiga asas acuan pembangunan perkebunan bagi pengembangan ekonomi, yaitu (1) Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional, (2) Memperluas lapangan kerja, (3) Memelihara kekayaan dan kelestarian alam dan meningkatkan kesuburan sumberdaya alam. Secara historis dan realitasnya menunjukkan bahwa di wilayah perkebunan di Jawa Barat cenderung terjadinya ketimpangan kemajuan pembangunan, baik antara perkebunan rakyat, swasta, dan perkebunan negara maupun keragaan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa wilayah sentra produksi perkebunan mengalami ketertambatan dalam pembangunannya dan fenomena terjadinya *leakages* wilayah, dengan demikian kemajuan usaha perkebunan kopi belum diikuti dengan perkembangan pembangunan lokalnya. Model perkebunan melakukan usaha secara terintegrasi, hubungan hulu-hilir, dan kooperatif, sementara perkebunan rakyat secara individu dan kelompok usaha bersama yang relatif gurem dan tertinggal. Muncul pertanyaan sejauhmana koperasi sebagai suatu tatanan nilai usaha dan lembaga ekonomi bagi pembangunan ekonomi lokal dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi dunia.

Keberadaan kawasan perkebunan kopi bagi pengembangan ekonomi lokal berkaitan dengan pola pengembangan sistem pengusahaan dan kepemilikannya. Sebagai suatu sistem agribisnis, perkebunan kopi dapat dilihat dari kedua sisi inikepemilikannya. White (1985)

Book Chapter

menyatakan bahwa sistem pengusahaan perkebunan dapat dikategorikan ke dalam enam (6) bentuk utama, yaitu *plantation, vertical integration backward, vertical integration forward, dan contract farming, cooperative, dan individual*. Secara sederhana, sistem pengusahaan perkebunan kopi dapat dikategorikan menjadi *plantation, Vertical Integration, Contract farming dan Cooperative*. Sementara kepemilikan dapat dilihat dari unsur struktur permodalan, pola pembiayaan, dan pengelolaan aset bagi aset lancar maupun aset tetap.

Dalam prosesnya, menumbuhkembangkan agribisnis kopi merupakan upaya mentransformasi ekonomi para petani dan koperasi petani kopi untuk mencapai nilai tambah yang besar melalui diversifikasi kegiatan budidaya kopi, industrialisasi, produktivitas tenaga kerja, dukungan sumber pembiayaan, dan stabilisasi pendapatan dari agribisnis kopi. Koperasi kopi sebagai entitas bisnis agribisnis kopi yang beranggotakan para produsen pengolahan kopi, sehingga koperasi kopi berperan menjadi penghubung pasar *input* maupun pasar *output* bagi para anggotanya.

Koperasi dapat memfasilitasi penyediaan permodalan bagi usaha koperasi dan anggotanya guna meningkatkan kemampuan pasokan bahan baku, sarana produksi, maupun menampung hasil produksi kopi sebagai bahan mentah, bahan setengah jadi bagi industri. Keadaan ini berkonsekuensi bahwa koperasi kopi harus memiliki investasi yang memadai, teknologi yang handal, tenaga ahli terampil guna meraih peluang produksi, peluang pasar global, akses pasar domestik maupun daya saing produk komoditas kopi di pasar ekspor dunia.

Sistem pengusahaan dan sistem kepemilikan mempunyai hubungan yang erat. Sistem kepemilikan secara langsung akan menggambarkan dan memengaruhi kinerja perusahaan perkebunan dan aglomerasi ekonomi, di samping mempunyai hubungan timbal balik dari aspek kebijakan pemerintah. Kinerja koperasi sebagai rantai pasokan pasar komoditas kopi menentukan tingkat hubungan dan integrasi dan sustainabilitas dari sistem pengusahaan perkebunan yang ada. Adapun Sistem kepemilikan ditentukan oleh kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi hubungan secara interaksi antar entitas bisnis koperasi maupun antar wilayah baik lokal, regional, maupun internasional.

Fenomena keterhubungan desa-kota, agrowisata, sentra produksi, pusat kawasan, dan pariwisata alam di perkebunan kopi merupakan sisi positif lainnya yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Perkembangan produksi, nilai komoditas perkebunan yang semakin besar, dan kesempatan ekonomi kawasan perkebunan menjadi peluang bagi peningkatan kemampuan ekonomi lokal dan semakin berkembangnya pembangunan lokal.

Tingkat hubungan, integrasi, *multiplier effect*, dan sustainabilitas sistem pengusahaan perkebunan akan memengaruhi capaian ekonomi lokal. Koperasi sebagai *agent of development* dari usaha perkebunan kopi diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dalam bentuk hubungan pasar, hubungan pengolahan produk, hubungan spasial, integrasi usaha dan wilayah efek berganda. Hal ini dapat diukur dari, perolehan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan kesempatan kerja, serta adanya kesinambungan pembangunan baik secara ekonomi maupun ekologi. Dengan demikian, maka upaya melakukan integrasi pengembangan kawasan perkebunan dengan ekonomi lokal perlu dilakukan guna

tercapainya tujuan pembangunan yang merata, stabil dan memberikan manfaat yang memperbesar pertumbuhan secara sektoral dan wilayah.

Adanya integrasi antara pengembangan kawasan dengan kegiatan ekonominya akan memberikan hubungan yang erat dan *multiplier effect* yang besar bagi perkembangan agribisnis komoditas dan menumbuhkembangkan ekonomi bagi penduduk maupun ekonomi wilayah. Interaksi kawasan perkebunan di perdesaan dengan perkotaan (*Rural Urban Linkage*) melalui penjualan produk kopi dan ekspor kopi. Interaksi ini memberikan nilai tambah dalam bentuk pendapatan, tenaga kerja, dan keuntungan informasi atau keuntungan eksternal lainnya. Glasson (1977) menyatakan bahwa pendapatan dari sektor ekspor pada suatu wilayah mengakibatkan kegiatan penduduk lokal semakin berkembang, berupa adanya perputaran modal dan tenaga kerja, keuntungan eksternal, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Untuk mencapai produktivitas dan kapabilitas anggota koperasi dalam sistem agribisnis yang efektif dan efisien, maka perlu integrasi kegiatan sejak kegiatan hulu perkebunan hingga hubungan pasar sebagai suatu industri. Koperasi selanjutnya menjadi kunci pengembangan usaha anggota dan efisiensi usaha perusahaan koperasi. Namun demikian, hubungan pasar antara koperasi kopi dengan para petani kopi sebagai anggota dan koperasi berinteraksi dengan pasar kopi menjadi tantangan yang akan menentukan hasil prestasi koperasi secara internal maupun eksternal. Di sinilah muncul suatu pertanyaan, apakah tatanan nilai dan prinsip koperasi sebagai bentuk lembaga ekonomi merupakan alternatif yang mampu menjawab tantangan dan peluang pasar dengan berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki koperasi sebagai entitas bisnis koperasi, koperasi sebagai bagian rantai pasok dan rantai nilai komoditas kopi.

Sentra produksi komoditas perkebunan dunia terbatas hanya pada beberapa wilayah tertentu, sehingga kawasan sentra produksi kopi memiliki nilai komparatif dan kompetitif pasar kopi. Sentra produksi kopi menjadi bagian rantai pasar dunia bersifat global dan semakin terbuka. Fenomena *transborderless region* memperlebar kesempatan lokalitas untuk dapat memperoleh kesempatan pasar dan keuntungan eksternal dalam bentuk aliran komoditas perdagangan, investasi dan informasi.

Permintaan komoditas kopi di pasar dunia yang semakin tinggi ditengarai oleh preferensi konsumen Eropa, Jepang dan Amerika terhadap produk kopi yang semakin meningkat, merupakan kesempatan dan nilai positif dan kawasan perkebunan kopi. Pada sisi ini, koperasi menjadi agen industri pasar input dan pasar *output* komoditas kopi, sehingga koperasi kopi sejatinya menjadi agen pengembangan usaha petani kopi dan sekaligus sebagai agen peningkatan kapabilitas petani kopi dalam sistem agribisnis, baik *off-farm* maupun *on-farm*. Jika koperasi mampu memobilisasi sumberdaya dan usaha petani kopi, maka koperasi mampu memberi manfaat ekonomi bagi anggotanya, diikuti dengan efisiensi pasar komoditas kopi. Manakala manfaat marjinal kopi semakin naik diikuti semakin naiknya harga kopi, maka kebutuhan pengembangan budidaya, pengolahan, dan pemasaran kopi relatif juga akan meningkat. Namun demikian, koperasi sebagai perusahaan, menghadapi kendala dan keterbatasan dalam penggunaan sumber daya dan dana guna memenuhi kebutuhan berbagai macam kebutuhan para anggota petani kopi.

Terlebih lagi, permintaan produk kopi mengikuti prinsip ekuivalensi antara manfaat marjinal kopi dengan sejumlah barang komplementer maupun substitusinya. Salah satunya,

Book Chapter

terdapat perubahan preferensi konsumsi kopi yang lebih meningkat, sehingga hal ini menjadi peluang mendapatkan nilai tambah dalam bentuk pendapatan produk kopi akan semakin meningkat. Peluang pasar kopi perlu diraih dan pangsa pasarnya semakin membesar, sehingga dapat melakukan pengembangan usaha lokal berbasis komoditas kopi, dan tumbuhkembangnya varian kegiatan ekonomi lokal baru sebagai suatu inovasi.

Perloff dan Wingo (1977) menyatakan bahwa kekayaan sumberdaya alam suatu wilayah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan *multiplier effect* sektor ekspor terhadap perekonomian daerah. Koperasi kopi yang mampu mengelola usaha dalam rantai nilai dan rantai pasok pasar kopi diikuti dengan kemampuan mengakselerasi nilai budidaya perkebunan dari para petani kopi sampai rantai pemasaran komoditas kopi, akan menempati koperasi kopi sebagai faktor kunci pengembangan kawasan perkebunan kopi. Koperasi kopi menjadi agen pemberdaya bagi pengembangan ekonomi perdesaan melalui pengelolaan sumberdaya alam kawasan perkebunan kopi yang diintegrasikan dengan pengolahan dan pemasaran komoditas kopi sebagai sistem agribisnis yang utuh.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkesinambungan ditentukan oleh kemandirian masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Kemandirian lokal sebagai kemampuan lokal beserta unsur-unsur yang ada dalam wilayah, termasuk masyarakat dan kelembagaannya dalam arti luas, serta pemenuhan kebutuhan koperasi dan anggotanya. Pemanfaatan sumberdaya alam pada usaha dan budidaya kopi dari para petani (anggota koperasi) senantiasa mengacu pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan di dalam kesatuan keanekaragaman hayati dalam kawasan perkebunan kopi.

Koperasi Perkebunan Sebagai Pembangunan Alternatif

Perkebunan sebagai usaha ekstraksi sumber daya alam yang ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan perkebunan akan menentukan tingkat kemanfaatannya baik secara sosial maupun ekonomi di sekitarnya. Manfaat perkebunan dapat dilihat dalam dua hal, yaitu manfaat komersial dan manfaat sosial. Manfaat komersial diukur melalui ukuran keuangan dan finansial usaha perkebunan yang dilakukan, sedangkan manfaat sosial adalah manfaat keuangan atau manfaat lain yang diterima oleh masyarakat dan negara secara makro.

Sebagai usaha yang memberikan manfaat komersial, maka perkebunan bermanfaat memberi nilai ekonomi wilayah dan nilai tambah bagi usaha perkebunan. Manfaat nilai tambah yang dimaksud berupa pendapatan perkebunan yang diperoleh dari pendapatan hasil produksi dan nilai tambah lainnya berupa upah tenaga kerja masyarakat sebagai nilai tenaga kerja di wilayah tersebut dan pengeluaran pajak oleh pelaku perusahaan perkebunan kepada pemerintah yang akan didistribusikan kembali kepada lingkungan masyarakat perkebunan kopi dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan lingkungan perkebunan itu sendiri baik secara sosial maupun ekonomis.

Perkebunan kopi rakyat berkontribusi bagi pendapatan wilayahnya berupa pendapatan dari proses produksi, nilai tenaga kerja, dan pendapatan pajak. Pendapatan produksi dan nilai tenaga kerja dikategorikan sebagai pendapatan perkebunan bagi wilayahnya yang diterima secara langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan perkebunan sebagai nilai tambah dan pendapatan wilayahnya. Sedangkan pajak merupakan

pendapatan yang diterima oleh pihak pemerintah dari hasil produksi dan usaha perkebunan.

Besaran dan laju pendapatan dari perkebunan kopi ini akan berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Semakin besar tingkat pendapatan perkebunan akan semakin besar memberikan kontribusi pajak bagi wilayahnya. Perkembangan usaha perkebunan yang semakin tinggi akan meningkatkan pendapatan wilayah dan pajak daerahnya. Pendapatan perkebunan akan memberikan dampak kepada kemampuan daya beli masyarakat kepada kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok maupun sekunder. Semakin tinggi tingkat pendapatan perkebunan di suatu wilayah, maka akan merangsang pertumbuhan sektor lainnya, baik dalam bentuk hubungan *backward linkages* maupun *forward linkages*.

Walaupun program pengembangan ekonomi perkebunan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal, terdapat permasalahan utama yang dihadapi. Hal ini menyangkut keterlibatan beberapa institusi yang berbeda dalam peran dan rumusannya terhadap masalah yang sama. Salah satu di antaranya mengenai kebijakan pengembangan komoditas kopi dilakukan oleh pemerintah, namun kewenangan dan penetapan kebijakan investasi dan modal kerja berada pada kekuasaan penuh pihak perbankan. Sebagai contohnya adalah pengalaman kebijakan pemerintah mengenai pengembangan perkebunan rakyat dengan menyediakan skim kredit untuk koperasi dalam bentuk KUT dan KKPA. Penerapan skim ini mengalami hambatan dalam penyaluran dan realisasi pelaksanaannya, yang sangat ditentukan oleh mekanisme dan kekuasaan perbankan semata, sehingga keadaan ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perkebunan rakyat, yang diikuti dengan tingkat perkembangan usaha agroindustri kopi rakyat yang lamban, bahkan kurang menggemirakan.

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa salah satu kelemahan usaha perkebunan adalah tidak dapat menghasilkan *profit* sesegara mungkin dalam jangka pendek (tidak *quick yielding project*). Sering kali terdapat anggapan bahwa usaha perkebunan kopi bersifat layak tetapi tidak *bankable*. Beberapa faktor yang memengaruhi keadaan ini di antaranya

- a. Ketidakpastian harga produk
- b. Volume modal yang relatif besar pada masa pra produktif Suku bunga yang tinggi
- c. Tidak adanya masa tenggang waktu pembayaran (*grace period*)
- d. Jangka waktu pelunasan yang relatif pendek, sedangkan masa produksi relatif panjang
- e. Prosedur pengajuan kredit yang relatif berbelit-belit

Kerjasama kooperatif akan mendukung aktivitas usaha perkebunan yang secara ekonomi akan efisien jika dalam skala usaha besar. Sebagai contoh, Spillane (1992) dan Copper (2002) menyebutkan bahwa skala ekonomis usaha perkebunan kopi adalah 300-400 hektar. Tenaga kerja terampil sangat dibutuhkan dalam sistem perkebunan kopi dengan skala usaha besar. Dalam sistem usaha perkebunan *plantation*, penggunaan tenaga kerja dilakukan secara intensif dengan tingkat pendapatan atau nilai tenaga kerja yang relatif rendah bahkan yang diikuti dengan tingkat upah yang rendah. Keadaan ini dapat tercapai jika segenap petani perkebunan rakyat anggotanya, yaitu para petani perkebunan rakyat. Artinya, terjadinya *multiplier effect* dalam bentuk *member's promotion* dan jalinan hubungan yang bersifat menunjang antara aktivitas anggota dan lembaga usahanya dalam

Book Chapter

menciptakan sinergisme kinerja perkebunan secara lokal.

Salah satu keuntungan utama model perkebunan *plantation* ini adalah tingkat profitabilitas akibat skala ekonomi yang besar dan efisiensi proses produksinya, di samping beberapa kelebihan lainnya :

- a. Kemampuan modal bagi investasi, biaya tetap produksi, peralatan pengolahan, dan penelitian ilmiah
- b. Komoditas kopi memerlukan pengolahan sesegera mungkin setelah pemanenan pucuk kopi yang dihasilkan. Oleh karena itu sistem pengolahan yang mencakup pengangkutan, pergudangan dan pabrik pengolahan sangat menentukan tingkat efisiensi usaha. Dengan demikian sarana dan prasarana menentukan dalam usaha agroindustri kopi.
- c. Produk kopi dijual secara lelang (*auction center*) yang jauh dari pusat produksi (perkebunan), sehingga membutuhkan usaha pemasaran dan transportasi. Guna mengatasi efisiensi pemasaran, maka skala usaha perkebunan besar dengan usaha yang terintegrasi secara vertikal merupakan alternatif terbaik dalam upaya meningkatkan profitabilitas dan efisiensi usaha.

Komoditas kopi sebagai produk industri merupakan usaha dengan karakteristik yang khas, yaitu membutuhkan manajemen usaha dengan tingkat keterampilan tinggi, teknik produksi yang canggih dan efisien, peralatan pengolahan yang berorientasi pasar dan kualitas produk, serta investasi yang besar. Agroindustri produk komoditas kopi dapat dihasilkan secara ekonomis dalam skala ekonomi yang besar, sehingga model perkebunan rakyat dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan kooperatif yang didasarkan atas prinsip usaha *plantation*.

Pajak yang diperoleh pemerintah daerah dari usaha perkebunan menjadi potensi bagi pembangunan ekonomi lokal. Hal ini terjadi manakala pajak tersebut dialokasikan kembali kepada investasi pembangunan sarana dan prasarana pembangunan yang menunjang pembangunan di wilayah perkebunan. Pembangunan prasarana jalan di wilayah perkebunan akan sangat mendukung tingkat produksi dan produktivitas usaha perkebunan. Faktor produksi terpenting bagi agroindustri perkebunan adalah tanaman, tanah, tenaga kerja, model transportasi, mesin pengolahan, dan prasarana jalan. Pembangunan dan tersedianya prasarana jalan di lokasi perkebunan kopi dan dari perkebunan ke jaringan lokasi pemasaran (kota lain dan wilayah lainnya) akan sangat menunjang peningkatan kinerja produksi dan produktivitas produk perkebunan. Semakin mudah akses pengangkutan produksi kebun ke lokasi pengolahan akan meningkatkan tingkat jumlah dan kualitas produk perkebunan yang dihasilkan.

Peningkatan penerimaan pajak dari hasil kegiatan perkebunan kopi, secara konseptual akan mampu meningkatkan pelayanan dan fasilitas pembangunan di kawasan perkebunan baik bagi perkebunan rakyat. Sebenarnya ada beberapa sumber penerimaan pajak bagi pemerintah daerah, yaitu pajak ekspor, pajak impor, pajak ekspor tambahan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Perseroan.

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang menunjang proses produksi, pengolahan, dan pemasaran produk kopi. Pembangunan jaringan transportasi, peningkatan kapasitas jalan, dan ketersediaan model transport bagi tenaga kerja maupun aliran produk perkebunan kopi yang dihasilkan akan menentukan tingkat kinerja agroindustri

perkebunan. Dengan demikian, pajak yang bersumber dari perkebunan kopi akan efektif, bernilai guna, dan memberikan *multipler effect* bagi perkembangan agroindustri perkebunan kopi pada tingkat lokal dan terintegrasi dengan ekonomi wilayah luarnya.

Pajak yang diperoleh dari perkebunan selayaknya bisa memberdayakan pemerintahan lokal dalam melakukan fungsinya dan kewenangannya, di antaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana baru, regulasi investasi dan modal, penyuluhan dan penelitian yang menunjang produksi perkebunan kopi bagi wilayahnya. Regulasi investasi dan modal diperlukan bagi agroindustri perkebunan mengingat usaha perkebunan memerlukan modal investasi dan modal yang cukup besar dengan waktu yang relatif lama, regulasi tersebut dalam bentuk kebijakan penyediaan dana investasi dan modal kerja yang mudah diakses oleh para petani usaha perkebunan kopi, terutama perkebunan rakyat.

Pemerintah bertindak sebagai representasi negara yang berfungsi menjadi pengawal transaksi. Sementara perusahaan eksportir/swasta berperan sebagai pendamping mengenai teknik budidaya kopi, panen, pengolahan, dan sertifikasi produk kopi. Pendampingan juga dilengkapi dengan kegiatan pelatihan berupa praktik GAP (*Good Agriculture Practice*), pembuatan limbah pertanian/kompos, pemberian sertifikasi produk, hingga penyediaan seperangkat sarana prasarana sistem agribisnis kopi, termasuk keamanan kerja kegiatan industri kopi.

Koperasi kopi menjadi agen perubahan, agen pemberdaya bagi para anggotanya, baik petani budidaya kopi maupun produsen pengolah dan pemasar produk kopi. Sebagai agen pemberdaya, maka perusahaan koperasi akan dihadapkan *agency trap* pada efisiensi dan produktivitas. Koperasi dihadapkan pada tantangan penyediaan pembiayaan dan permodalan usahanya di samping mendapat tuntutan para manajer dan karyawan perusahaan koperasi yang perlu penghargaan dan profesionalitas. Pada kondisi ini, sebagai agensi maka kinerja koperasi kopi perlu secara konsisten memperhatikan kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam berhubungan pasar dengan para anggotanya, bertransaksi dengan pasar, dan memberikan insentif bagi manajerial koperasi secara profesional agar tercapai keberlanjutan usaha koperasi, promosi ekonomi petani kopi, produktivitas produsen-pemasar kopi, dan terjalinnya jaringan pasar dalam jangka panjang.

Koperasi Sebagai Agensi

Teori agensi (Eisenhardt, 1989) menyatakan bahwa pelaku dalam mengelola suatu kegiatan di tempat sebagai agen yang memiliki dua kepentingan individu dirinya dan kepentingan lembaga, sehingga muncul *agency trap* dalam pencapaian tujuannya. Pada satu sisi setiap individu memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri dengan berbagai motivasi, kebutuhan, kemampuan, dan prestasi yang melatarbelakangi, sehingga secara personal akan berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya. Sementara pada sisi lainnya, pelaku diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan lembaga/organisasinya. Perilaku dari agen dalam kelembagaan ini berkait erat dengan biaya transaksi, yang berujung pada pertimbangan efisiensi, perubahan perilaku, dan aturan insentif/disinsentif.

Sementara konsep teori kunci berpandangan terjadinya reaksi antara substrat dengan enzim karena adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan situs aktif (*active site*) dari enzim, sehingga sisi aktif enzim cenderung kaku. Substrat berperan sebagai kunci

Book Chapter

masuk ke dalam situs aktif, yang berperan sebagai gembok, sehingga terjadi kompleks enzim-substrat. Analogis ini menjelaskan bahwa koperasi menjadi kunci yang menentukan aksi dan reaksi dari kegiatan organisasi dan usaha koperasi dari keterlibatan dan partisipasi aktif para anggota koperasi, sehingga hubungan koperasi dengan anggotanya merupakan sesuatu yang kompleks dan perlu dikenali secara organik koneksinya. Terdapat ikatan kompleks koperasi dengan anggotanya, produk kegiatan berkoperasi merupakan hasil reaksi pengelola koperasi dengan anggotanya, dan kinerja usaha anggota akan kembali pada konfigurasi semula tergantung keaktifan pengelola koperasi.

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Teori agensi ini berawal dari upaya untuk dapat membantu seorang auditor untuk memahami masalah yang muncul antara agen dan *principal*, terjadi perbedaan pemahaman dan bias kepentingan antara pihak agen dengan pemilik perusahaan.

Dalam konteks perkoperasian, anggota sebagai pemilik, maka anggota berhak mengetahui semua informasi mengenai kegiatan perusahaan koperasi, di antaranya pengoperasian dana yang telah dikeluarkan maupun anggaran yang diinvestasikan dalam koperasi sebagai perusahaan. Pengurus, manajer, dan karyawan koperasi sebagai agen dalam perusahaan koperasi menyusun pertanggungjawaban berbagai kegiatan usaha yang telah dilakukan. Laporan pertanggung jawaban dibuat oleh pengurus, manajer, dan karyawan sebagai agen, sementara anggota sebagai prinsipal mendapat informasi dan capaian dari penilaian kinerja koperasi dalam periode tertentu.

Terdapat kecenderungan perilaku pengurus, manajer, dan karyawan melakukan tindakan tertentu dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, yaitu kinerja seadanya sesuai realisasi nyata dan kinerja seolah-olah berada dalam baik dan prestasi tinggi, bahkan upaya menunjukkan penciptaan keuntungan bagi pemilik perusahaan, sehingga kinerja koperasi yang dicapai oleh pengurus, manajer, dan karyawan seakan-akan baik. Tentunya, kinerja koperasi yang dicapai selayaknya menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan pada periode berikutnya. Di sinilah letaknya peran koperasi sebagai agensi memberdayakan usaha anggota, anggota sebagai pemilik perusahaan koperasi.

Ujiyanto dan Bambang (2007) menggunakan tiga asumsi sifat manusia dalam teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, maka pengurus, manajer, dan karyawan dalam perusahaan koperasi sebagai manusia akan bertindak mungkin dapat mengutamakan kepentingan pribadinya. Pengurus, manajer, dan karyawan koperasi sebagai agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pribadinya, dalam bentuk perolehan investasi, pinjaman, maupun kompensasi.

Konflik kepentingan pada koperasi semakin kecil ketika anggota koperasi dapat memonitor aktivitas pengurus, manajer, dan karyawan untuk memastikan bahwa pengurus, manajer, dan karyawan koperasi bekerja sesuai dengan keinginan dan kepentingan anggota koperasi. Segenap anggota koperasi seharusnya memiliki informasi yang cukup tentang kinerja pengurus, manajer, dan karyawan koperasi. Jika terjadi ketidakseimbangan informasi yang dimiliki anggota dengan pengurus, manajer, dan karyawan akan

menimbulkan asimetri informasi, sehingga setiap individu bertindak memaksimalkan kepentingannya sendiri dan mengakibatkan konflik kepentingan yang terjadi antara pengurus, manajer, dan karyawan koperasi dengan para anggota koperasi. Hal ini mendorong pengurus, manajer, dan karyawan koperasi untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada anggota koperasi sebagai pemilik, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja pengurus, manajer, dan karyawan koperasi. Di sinilah pentingnya koperasi sebagai agensi pemberdaya untuk menyajikan informasi ekonomi yang lengkap bagi kepentingan pengembangan usaha anggota dan operasionalisasi perusahaan koperasi secara produktif dan efisien.

Mengacu pada pendapat Scott (2015), maka kinerja koperasi sebagai perusahaan seharusnya melakukan tindakan seimbang dan adil agar terhindar dari konflik keagenan antara anggota dengan pengurus, manajer, dan karyawan koperasi, sehingga dapat memotivasi pengurus, manajer, dan karyawan koperasi rasional untuk bertindak atas nama anggota koperasi dan saat terdapat perbedaan kepentingan antara pengurus, manajer, dan karyawan koperasi dengan anggota koperasi. Di sini letak koperasi sebagai agen pemberdaya dalam mensinkronisasikan tujuan usaha anggota dengan layanan koperasi yang dilakukan pengurus, manajer, dan karyawan koperasi.

Atas dasar teori keagenan (Brigham & Houston (2006), maka pengurus, manajer, dan karyawan koperasi diberi kekuasaan oleh anggota koperasi sebagai pemilik untuk membuat keputusan. Hubungan agensi dalam koperasi muncul ketika anggota koperasi mempekerjakan pengurus, manajer, dan karyawan koperasi untuk memberikan suatu jasa. Mengacu pendapat (Gudono, 2012), dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada pengurus, manajer, dan karyawan koperasi (Jensen dan Meckling, 1976). Para anggota koperasi sebagai pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pengurus, manajer, dan karyawan koperasi, sehingga koperasi sebagai agen dapat mereduksi dan meminimalisasi potensi konflik kepentingan serta upaya memecahkan masalah yang muncul dalam hubungan pengurus, manajer, dan karyawan koperasi dengan anggota koperasi, sehingga produktivitas usaha anggota dan layanan koperasi berada pada posisi optimal dan berkelanjutan. Koperasi berperan sebagai agensi optimal dan berada dalam kondisi *good corporate cooperative*.

Penutup

Manusia merupakan kunci utama dalam kemandirian lokal, sehingga upaya peningkatan kemandirian lokal dijabarkan dalam bentuk pemberdayaan manusia dan masyarakat lokal. Perkembangan suatu koperasi ditentukan oleh sumberdaya manusia koperasi, sehingga kemandirian pengurus, manajer, dan karyawan koperasi tercapai jika dapat memanfaatkan interkoneksi dan interoperasional kegiatan koperasi dan usaha anggotanya dalam hubungan pasar. Kawasan perkebunan kopi menjadi satu dengan tempat tinggal para anggota koperasi petani pekebun kopi pada suatu lokasi yang berinteraksi antar sesamanya. Koperasi menyatu dengan lingkungannya hingga membentuk cara hidup bersama (*common way of life*) yang menjadi jati diri bekerjasama para petani kopi sebagai anggota koperasi pada berbagai aspek agribisnis. Dengan demikian, koperasi kopi merupakan agen pemberdaya bagi para petani kopi dan anggota koperasi kopi.

Koperasi kopi bukan hanya sebatas membentuk koperasi sebagai kumpulan usaha petani, tetapi juga koperasi berbentuk sistem pengusahaan perkebunan kopi yang mampu

Book Chapter

mengoptimalkan pengembangan wilayah, integrasi usaha, dan pendorong ekonomi lokal pada tingkat subwilayah dan wilayah, dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, rasionalitas dan efisiensi usaha sebagai tolok ukuran kegiatan usahanya. Koperasi kopi berperan sebagai kelembagaan yang meningkatkan kemampuan petani perkebunan kopi rakyat dalam budidaya, produksi, pengolahan, pemasaran, dan layanan sistem informasi pemasaran produk kopi. Dengan demikian koperasi kopi memerlukan strategi pengembangan usaha yang komprehensif agar kinerja koperasi memberi promosi ekonomi bagi anggota, peningkatan usaha koperasi, dan efektivitas keorganisasian koperasi.

Koperasi kopi selayaknya menghasilkan kopi yang unik untuk memenuhi preferensi konsumen di pasar domestik maupun global, sehingga kopi yang unik diakui kualitasnya secara formal jika melalui sertifikasi produk kopi. Untuk memenuhi standar sertifikasi produk kopi memerlukan program dan kegiatan inovatif dan kreatif sejak mulai dari usaha tani, budidaya, proses pengolahan, pasca panen, pengelolaan rantai nilai dan rantai pasok, sertifikasi serta pemasaran produk kopi. Petani kopi sebagai anggota koperasi kopi menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan pengetahuan dalam mengelola budidaya kopi secara optimal. Terlebih lagi, para petani dan anggota koperasi kopi belum mampu menghasilkan biji maupun olahan produk kopi bermutu sebagaimana standar yang dipersyaratkan untuk ekspor. Sangatlah mendesak memfungsikan koperasi kopi sebagai agensi yang memberdayakan anggotanya, terutama para petani kopi dan produsen komoditas kopi yang terikat dalam organisasi dan usaha koperasi. Koperasi yang memiliki identitas jatidiri koperasi dan menerapkan nilai maupun prinsip koperasi secara konsisten dan konsekuen. Salah satu peran yang penting dan mendesak untuk mewujudkan koperasi sebagai agen pemberdaya adalah pendidikan perkoperasian, pendidikan usaha tani, budidaya, proses pengolahan, pasca panen, pengelolaan rantai nilai dan rantai pasok, sertifikasi serta pemasaran digital produk kopi.

Petani kopi sebagai anggota koperasi harus memiliki inovasi, benih berkualitas tinggi secara mandiri, penggunaan peralatan dan teknologi, pemanfaatan akses informasi & teknologi komunikasi (Prisca Christian Permatasari, et.al, 2018). Koperasi kopi menjadi agen yang berperan melakukan pendidikan, pembinaan, dan penguatan sosial ekonomi anggotanya dalam kegiatan budidaya tanaman kopi, produksi dan pengolahan maupun pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk kopi. Koperasi menjadi agensi pemberdaya ekonomi lokal yang bermanfaat bagi promosi ekonomi anggota, sehingga terhubung jaringan usaha secara integral yang mutualistis antara usaha anggota dengan usaha koperasi. Melalui model bisnis baru berupa kerjasama anggota koperasi dan mitra strategis terlibat dalam proses penetapan harga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi berperan positif dari sisi kualitas pemanfaatan layanan koperasi oleh anggota, maupun katalisasi koperasi bagi promosi ekonomi anggota. sebagaimana Dufler (1994), Hanel (1989), Soewardi (1995) bahwa koperasi memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi anggota.

Bibliografi

- Brigham, Eugene F. & Houston Juel F. 2001. *“Manajemen Keuangan Jilid 1 dan 2”*, Alih Bahasa Hermawan Wibowo, Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga, 2001, Jakarta
- Cooper, H.D., C. Spillane and T. Hodgkin. 2001. *Broadening the genetic base of crops: An*

- overview*. In H.D. Cooper, C. Spillane, and T. Hodgkin (Eds.). *Broadening the Genetic Base of Crop Production*. CABI Publication
- Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Bogor : PT Penerbit IPB Press
- Dubell, Folke. 1985. *Pembangunan Koperasi. Institut Manajemen Koperasi Indonesia*. Jatinangor, Sumedang: Penerbit CPT Ikopin.
- Dulfer, E. and Juhani. L.(Eds) 1994. *International Handbook Of Cooperative Organization..* Gottingen: Vanden Hoeck & Ruprecht.
- Gudono., 2014. *Teori Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat,
- Hannel, Alfred. 1989. *Organisasi Koperasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Herman Soewardi. 1995. *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*. Jatinangor, Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia. CPT Penerbit-Ikopin..
- Mc Clelland, David. 1986. *The Achieving Society*. New Jersey :Van Nonstrand Company. Inc.
- Perloff and Wingo, 1975. *Natural Resource Endowment and Regional Economic Growth dalam Friedman dan Alomso ed., Regional Policy, Reading in Theory and Application*. MIT Press.
- Scott, William R. (2015) *Financial Accounting theory*. 4th Edition. Canada Inc : PersonEducation.
- Spillane, J.J. 1992. *Komoditi Teh Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Referensi Lain

- Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia. 1997. *Statistik Kopi 1990-1997*. Pusat Penelitian Kopi dan Kina. Bandung.
- Bank Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020*. ISSN 0522-2572.
- Bank Indonesia. 2021. *Urgensi Mendorong Kinerja Industri Pengolahan sebagai Penopang Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi*. Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Bank Indonesia Mei 2021.
- Bennet, Robert J. and Gunter Krebs. 1994. *Local Economic Development Partnerships : An Analysis of Policy Networks in EX_LEDA Local Employment Development Strategies*. Regional Studies. Vol 28. Pp 119-140. London. UK.
- Blakely, Edward J. 1989. *Planning Local Economic Development. Theory and Practice*. Sage Publication. Kopi International Professional Publishers. Newbury Park-London-. New Delhi.
- BPS. 2021. *Statistik Kopi Indonesia. Indonesian Coffee Statistics 2020* ISSN: 2714-8505.
- Coffey, H & Polese, 1984, *The Concept Of Local Development : A Stage Model Of*

Book Chapter

- Endogenous Regional Growth*; Paper Of Regional Science Damanik, Janianton & Weber, Helmut F. 2006. Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: Andi.
- Eisenhardt, Kathleem. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management Review, 14. Hal 57-74.
- Firman, Tommy. 1996. Pola urbanisasi di Indonesia: kajian data Sensus Penduduk 1980 dan 1990. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ginandjar Kartasmita. 1997. Power dan Empowerment : Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Perencanaan Pembangunan. No. 7 Januari 1997.
- Herman. 2003. Membangkitkan Kembali Peran Komoditas Kopi Bagi Perekonomian Indonesia. <http://www.perkopiantunia.htm>. diakses pada 8 Januari 2015.
- Jehsen, Michael C. & W.H. Meckling. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3. p. 305-360.
- Prisca Christian Permatasari, Abdul Basith, Heti Muyati, 2018. *Model Bisnis Inklusif Rantai Nilai Kopi Arabica Di Bondowoso, Jawa Timur* . Jurnal Manajemen Teknologi. SBM.ITB. 17 (2) 2018. 117-125.
- Supriyadi R, Ery. 2007. Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 18 (2): 103-123.
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)". Simposium Nasional Akuntansi X, IAI, 2007.
- White Benjamin, 1992. Pola-pola Transformasi Pertanian Rakyat Dalam Perspektif Analisis Sosial. Catatan untuk Workshop Masyarakat Irian Jaya dalam Kajian Sosial Ekonomi. Kerjasama YPMD-Irja dan Akatiga Bandung, Jayapura 7-13 Agustus 1992.14

